



INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER Provinsi DKI Jakarta TAHUN 2012

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) DKI Jakarta Tahun 2012

A. Penjelasan Umum

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

B. IPG DKI Jakarta Tahun 2012

Selama tahun 2012 IPG DKI Jakarta tercatat sebesar 74,66 naik 0,66 poin dibanding IPG tahun 2011. Angka IPG DKI Jakarta lebih tinggi dari rata-rata IPG yang dicapai nasional yang sebesar 68,52. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender.

Pada level provinsi IPG DKI Jakarta tertinggi diantara provinsi-provinsi lainnya, namun bila dilihat dari sisi kesenjangan jender yang paling rendah (gap antara IPM dan IPG yang terkecil) maka DKI Jakarta menempati peringkat ke empat dengan rasio IPG terhadap IPM sebesar 95,32 persen. Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan kesenjangan jender terendah di Indonesia dengan rasio IPG 96,66 persen.

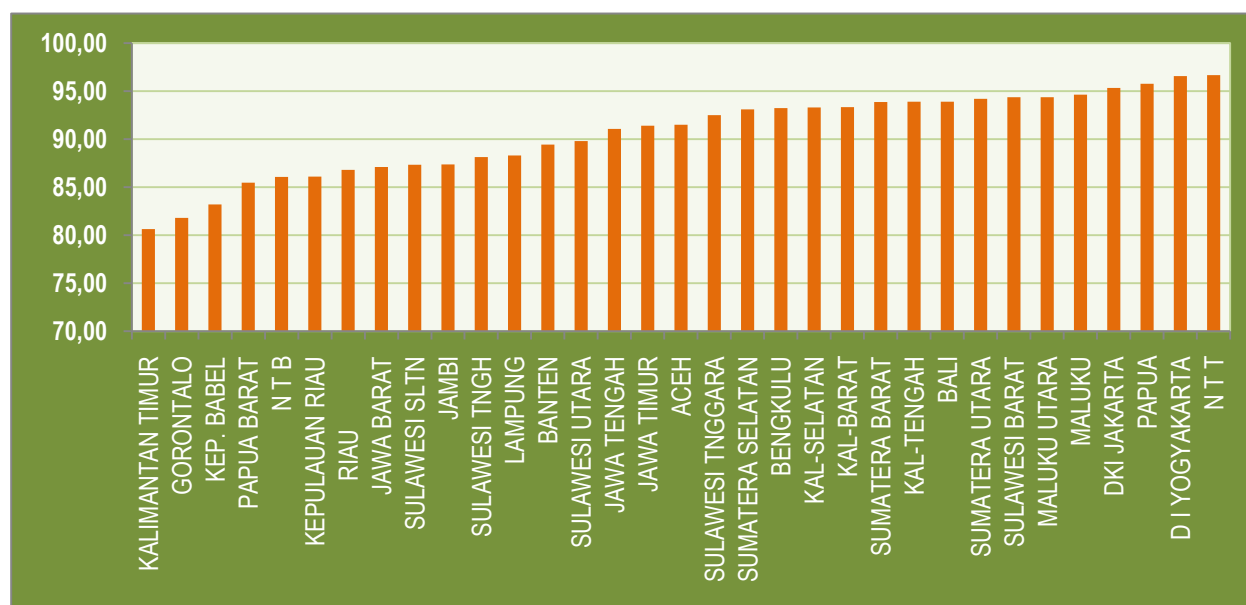
Pada level kabupaten/kota, IPG tertinggi dicapai oleh Kota Jakarta Pusat (75,59) dan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Seribu (58,80). Demikian pula bila dilihat kesenjanganannya, Jakarta Pusat menjadi wilayah yang mengalami kesenjangan terendah dengan rasio IPG terhadap IPM sebesar 94,28 persen.

Tabel 1.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) DKI Jakarta Tahun 2010 - 2012

Tahun	IPM	IPG	Rasio IPG terhadap IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	77,60	73,35	94,52
2011	77,97	74,01	94,91
2012	78,33	74,66	95,31

Sejauh ini hasil yang dicapai upaya pembangunan kualitas hidup di Jakarta masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM. Pada perkembangannya, selama kurun waktu 2010-2012 IPG DKI Jakarta selalu menunjukkan posisi lebih rendah dibandingkan IPM. Besaran rasio yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara IPG terhadap IPM pada kisaran 80 - 96 persen. Hal ini dapat dimaknai, meski IPG memperlihatkan perkembangan yang selalu meningkat selama periode 2010-2012, tetapi kesenjangan gender masih terjadi.

Grafik 1.
Peringkat Kesenjangan Jender Menurut Provinsi Tahun 2012



Adanya kesenjangan gender yang terjadi di tingkat provinsi juga tampak di tingkat kabupaten/kota. Fenomena ini, dapat ditunjukkan melalui besaran angka IPG yang lebih rendah dibanding angka IPM di semua kabupaten/kota. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa persoalan kesenjangan gender masih terjadi di semua wilayah. Berdasarkan besaran rasio IPG terhadap IPM, maka wilayah dengan kategori kesenjangan terendah (rasio IPG tertinggi) adalah Jakarta Pusat (95,54 persen). Setelah itu diikuti oleh Jakarta Utara (94,40 persen) dan Jakarta Selatan (93,89 persen). Kesenjangan gender tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu (82,32 persen).

Tabel 2.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) DKI Jakarta Tahun 2012
Menurut Kabupaten/Kota

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPM	IPG	Rasio IPG terhadap IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3100	DKI JAKARTA	78,33	74,66	95,31
3101	Kep. Seribu	71,45	58,80	82,30
3171	Kota Jakarta Selatan	80,17	75,27	93,89
3172	Kota Jakarta Timur	79,80	74,33	93,15
3173	Kota Jakarta Pusat	79,12	75,59	95,54
3174	Kota Jakarta Barat	79,43	74,02	93,19
3175	Kota Jakarta Utara	78,25	73,87	94,40

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DKI Jakarta Tahun 2012

A. Penjelasan Umum

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

B. IDG DKI Jakarta Tahun 2012

Selama tahun 2012 IDG DKI Jakarta tercatat sebesar 76,14 lebih tinggi dari rata-rata IDG yang dicapai nasional yang sebesar 70,07. Pada level nasional DKI Jakarta menempati posisi ke tiga setelah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Maluku.

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Jakarta yang diukur melalui IDG memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Pada tahun 2012, IDG di Jakarta mencapai 76,14, kemudian sejalan dengan berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan IDG meningkat hingga menjadi 76,14 pada tahun 2012. Ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan pada tahun 2011 sebesar 74,70 persen dari peranan yang dijalankan laki-laki, kemudian meningkat menjadi 76,14 persen pada tahun 2012.

Tabel 3.

**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DKI Jakarta Tahun 2011 - 2012
Menurut Variabel Pembentuknya**

Variabel Pembentuk	2011	2012
(1)	(2)	(3)
Keterlibatan Perempuan di Parlemen	24,47	24,47
Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	42,53	48,83
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	36,53	36,53
IDG	74,70	76,14

Perbedaan tingkat pemberdayaan gender juga terlihat pada tingkat wilayah kabupaten/kota. Dibandingkan kondisi tahun 2011, terjadi pergeseran wilayah, peranan wanita dalam pengambilan keputusan tertinggi ditunjukkan di tahun 2011 adalah Jakarta Pusat sedangkan di tahun 2012 adalah wilayah Jakarta Selatan dengan nilai IDG 76,01. Setelah itu diikuti oleh Jakarta Pusat (75,15) dan Jakarta Barat (75,00).

Kewenangan otonomi daerah pada tingkat provinsi membuat DKI Jakarta hanya memiliki perwakilan rakyat sampai pada tingkat provinsi sehingga keterlibatan perempuan dalam parlemen setiap wilayah memiliki proporsi yang sama, yakni 24,47 persen. Secara umum peran perempuan Jakarta sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi di tahun 2012 tertinggi tercatat di kota Jakarta Utara sebesar 63,83 persen, dan terendah di Jakarta Timur, sebesar 38,33 persen. Sementara peran wanita di Jakarta dalam memberikan pendapatan kerja di Jakarta rata-rata sebesar 36,55 persen. Peran terendah atas sumbangan pendapatan kerja diberikan oleh kaum wanita di Kepulauan Seribu.

Tabel 4.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DKI Jakarta Tahun 2011 - 2012
Menurut Kabupaten/Kota

Provinsi/Kabupaten	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sbg tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
				2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI JAKARTA	24,47	48,83	36,55	74,70	76,14
Kep. Seribu	24,47	52,74	23,43	63,35	63,75
Kota Jakarta Selatan	24,47	45,10	34,47	74,70	76,01
Kota Jakarta Timur	24,47	38,33	33,14	73,75	73,76
Kota Jakarta Pusat	24,47	62,57	36,83	75,52	75,15
Kota Jakarta Barat	24,47	42,37	33,42	74,18	75,00
Kota Jakarta Utara	24,47	63,83	35,03	74,60	73,08



BPS PROVINSI DKI JAKARTA

Informasi lebih lanjut hubungi:

Ir. Dwi Paramita Dewi, ME
Bidang Neraca Wilayah & Analisis Statistik

Telepon : 021-42877301, ext 4040
Fax : 021-42877350
e-mail : bps3100@bps.go.id
Homepage : [http:// jakarta.bps.go.id/](http://jakarta.bps.go.id/)